



Article Informations
Corresponding Email:
anggeng.alpina@icloud.com

Received: 22/08/2025; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

KEBIJAKAN LUAR NEGERI VANUATU DALAM INTERNASIONALISASI ISU HAM DI PAPUA DALAM DEWAN MAJELIS PBB PADA TAHUN 2016-2021

Anggeng Alpina Dewanti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan luar negeri Vanuatu dalam memprioritaskan isu hak asasi manusia (HAM) di Papua pada forum internasional selama periode 2016-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alasan-alasan strategis di balik dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua serta mengeksplorasi bagaimana diplomasi yang dijalankan Vanuatu mempengaruhi posisi negara tersebut di tingkat regional dan internasional. Vanuatu secara konsisten mendukung kemerdekaan Papua melalui diplomasi aktif di berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Melanesian *Spearhead Group* (MSG). Dukungan ini didasarkan pada beberapa kepentingan strategis, termasuk keamanan regional, potensi ekonomi, dan penyebaran ideologi anti-kolonialisme serta solidaritas Melanesia. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya, Vanuatu mampu memanfaatkan diplomasi multilateral untuk memperkuat posisinya di kawasan Pasifik Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua bukan hanya didorong oleh aspirasi ideologis, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan stabilitas regional dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kebijakan Vanuatu dalam mendukung Papua merdeka merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Pasifik Selatan.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Papua Merdeka, Diplomasi Internasional

Abstract

This research aims to understand Vanuatu's foreign policy in prioritizing human rights issues in Papua in international forums during the 2016-2021 period. It aims to identify the strategic reasons behind Vanuatu's support for Papuan independence and explore

how Vanuatu's diplomacy influences the country's regional and international standing. Vanuatu has consistently supported Papuan independence through active diplomacy in various international organizations, such as the United Nations (UN) and the Melanesian Spearhead Group (MSG). This support is based on several strategic interests, including regional security, economic potential, and the spread of anti-colonialism ideology and Melanesian solidarity. Despite its limited resources, Vanuatu is able to utilize multilateral diplomacy to strengthen its position in the South Pacific region. This research shows that Vanuatu's support for Papuan independence is not only driven by ideological aspirations, but also as a strategy to improve regional stability and fight for human rights. Vanuatu's policy in supporting an independent Papua is a strategic step to strengthen its political, economic and security position in the South Pacific region.

Keywords: Foreign Policy, Free Papua, International Diplomacy

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional negara menjadi salah satu aktor paling penting, negara-negara akan berinteraksi satu sama lain dengan tujuan mencapai kepentingan ataupun hal lainnya. Setiap bentuk komunikasi di luar batas negara disebut dengan hubungan internasional. Hal ini termasuk dalam komunikasi antara aktor negara dengan negara, aktor aktor non-negara dengan aktor negara, dan aktor non-negara dengan aktor non-negara lainnya. Tujuan, nilai, keputusan, dan Tindakan yang harus dicapai oleh negara dan pemerintah dalam hubungan internasional, menurut studi kebijakan luar negeri (Webber, M., & Smith, M, 2002).

K.J Holsti juga menggambarkan bahwa jika suatu negara melakukan tindakan terhadap lingkungan internasional yang di dalamnya termasuk negara dan sekumpulan negara beserta unsur lainnya, maka itu disebut dengan politik luar negeri (Setiawan, A., & Sulastri, E, 2017).

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu instrument yang menarik bagi kajian hubungan internasional, Salah satu kebijakan luar negeri yang akan dikaji oleh penulis yaitu kebijakan luar negeri dari negara Vanuatu. Vanuatu sering sekali mengangkat permasalahan isu HAM yang terjadi di Papua dalam forum internasional. Vanuatu juga mempengaruhi dari negara-negara di laut pasifik dalam memberikan dukungan atas kemerdekaan Papua (Yandwardhana, Emir, 2021).

Pada 2018, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain. Pada 2019-2021,

Perdana Menteri Vanuatu berulang kali mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua di PBB, yang ditanggapi Indonesia dengan tuduhan bahwa Vanuatu mendukung separatisme dan ikut campur urusan dalam negeri. Akibat ketegangan ini, Indonesia berupaya memperbaiki hubungan dengan Vanuatu melalui diplomasi dan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan pendidikan (Yandwardhana, Emir, 2021).

Kebijakan luar negeri suatu negara, seperti Vanuatu, dapat mempengaruhi negara lain, meskipun Vanuatu adalah negara kecil. Vanuatu menggunakan diplomasi publik untuk meningkatkan pengaruhnya dan membentuk opini negara-negara kecil lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa Vanuatu gigih mengangkat isu HAM di Papua dalam forum internasional, dan apakah tindakan tersebut murni demi HAM atau didorong oleh kepentingan lain.

B. Kajian Teoritis

1. Peneliti menggunakan teori Neorealisme untuk menganalisis kebijakan luar negeri Vanuatu terkait isu HAM di Papua. Neorealisme, yang dipelopori oleh Kenneth Waltz, menekankan bahwa struktur anarki dalam sistem internasional mendorong negara untuk bertindak secara rasional dan memaksimalkan kekuatan guna menjaga keamanan. Neorealisme menganggap negara sebagai aktor unitaris dan rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional, dengan kapabilitas material seperti kekuatan militer dan ekonomi sebagai penentu utama kekuatan. Teori ini juga memperkenalkan konsep "Security Dilemma," di mana upaya negara untuk meningkatkan keamanan dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Peneliti menggunakan Neorealisme untuk mengevaluasi apakah tindakan Vanuatu yang terus mengangkat isu HAM di Papua didorong oleh kepentingan nasional dan faktor-faktor pendukung lainnya (Waltz, K. N, 1979).

2. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menganalisis tindakan Vanuatu dalam mengangkat isu HAM di Papua. Kepentingan nasional, yang menurut Alexander Wendt terbentuk dari

hasrat dan keyakinan serta terkonstruksi secara sosial, menjadi dasar kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah tindakan Vanuatu dalam mendesak Indonesia terkait isu HAM di Papua didorong oleh kepentingan nasional atau faktor lain yang memotivasi Vanuatu untuk terus mengangkat masalah ini di berbagai forum internasional (Mintz, A., & DeRouen, K, 2010).

3. Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah kumpulan ide dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengubah keadaan di negara tersebut. Kebijakan ini terdiri dari empat komponen utama: tujuan kebijakan luar negeri, instrumen kebijakan, lingkungan internasional, serta kapasitas dan kapabilitas nasional. Holsti membagi tujuan kebijakan luar negeri menjadi dua kategori dominan: tujuan jangka menengah, yang berfokus pada peningkatan prestise negara melalui industri, teknologi, dan militer, serta tujuan jangka panjang, yang melibatkan visi politik atau ideologi global yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional. Kebijakan luar negeri umumnya dirancang untuk mempengaruhi negara lain, mempertahankan keamanan nasional, dan mencapai kepentingan nasional (Holsti, K. J, 1987).

Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Mengapa Vanuatu menginternasionalisasi isu HAM di Papua dalam forum internasional selama periode 2016-2021?"

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk menggambarkan kebijakan Vanuatu dalam mengarusutamakan pelanggaran HAM di Papua. Tujuan khususnya adalah menganalisis alasan di balik kebijakan luar negeri Vanuatu dalam mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua dalam forum internasional selama periode 2016-2021.

2. PEMBAHASAN

Permasalahan Ham Di Papua Pada Tahun 2016-2021

Masalah Papua telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, termasuk di bawah Presiden Joko Widodo. Upaya dialog nasional direncanakan untuk menangani isu kemerdekaan dan keterbelakangan di Papua (Papuan Behind Bars, 2016). Survei LIPI dan Change.org pada

2017 menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan hak atas sumber daya alam menjadi perhatian utama masyarakat Papua. Pelanggaran HAM di Papua sering ditutupi sejak era Soeharto, sehingga banyak penduduk tidak mengetahui kejadian di daerah mereka. Masalah ini telah menjadi isu internasional, terutama dengan pelanggaran HAM, konflik antar klan, serta infrastruktur dan pendidikan yang *buruk* (VOA Indonesia, 2017).

Vanuatu secara konsisten mengangkat isu ini di forum internasional, seperti PBB, yang menegaskan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Vanuatu. Meskipun ada perbedaan pandangan, kedua negara tetap berupaya mencari solusi damai melalui dialog dan diplomasi. Papua juga mengalami peningkatan pelanggaran HAM, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan, dan operasi militer yang menyebabkan korban jiwa. Vanuatu dan negara-negara Pasifik lainnya mendukung hak Papua untuk menentukan nasib sendiri, sementara Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatannya dan mengatasi masalah ini dengan pendekatan pembangunan dan dialog (TAPOL, & BUK, 2022).

Pada tahun 2018, Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia, menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dalam konteks hubungan diplomatik dengan Vanuatu. Pernyataan ini merupakan tanggapan atas dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan Papua Barat. Kalla menyatakan bahwa isu Papua adalah masalah internal Indonesia yang harus diselesaikan tanpa campur tangan pihak asing. Sementara itu, Papua mengalami berbagai pelanggaran HAM, termasuk penembakan dan penyanderaan, yang memicu operasi militer oleh pemerintah Indonesia. Vanuatu, bersama negara-negara Pasifik lainnya, terus mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua di forum internasional, seperti PBB, yang menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Indonesia. Isu Papua juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, seperti konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Pusaka, sebuah LSM, mencatat banyak kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan investasi dan proyek industri di Papua pada tahun

2020 dan 2021. Konflik ini memperburuk kondisi kehidupan masyarakat adat, yang semakin terpinggirkan oleh aktivitas bisnis besar (Laia, K, 2022).

Kebijakan Vanuatu Terhadap Permasalahan Di Papua Pada Tahun 2016-2021

Vanuatu memainkan peran penting dalam mendukung hak-hak dan kemerdekaan Papua Barat di kancah internasional antara tahun 2016 hingga 2021, menunjukkan solidaritas negara-negara Pasifik terhadap perjuangan Papua. Vanuatu secara konsisten mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua di forum internasional, termasuk di Sidang Umum PBB, dan mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kritik Vanuatu terhadap Indonesia atas pelanggaran HAM dan dukungan terhadap gerakan separatis OPM memicu ketegangan diplomatik, dengan Indonesia menuduh Vanuatu melanggar prinsip non-intervensi. Meskipun dukungan Vanuatu didasarkan pada solidaritas Melanesia dan hak menentukan nasib sendiri, tindakan ini juga mencerminkan motif politik, yang menambah kompleksitas hubungan antara kedua negara di forum internasional (Ahmad, S).

Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Internasionalisasi Isu Ham Papua Pada Forum Internasional Tahun 2016-2021

Vanuatu secara konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat melalui kebijakan luar negeri yang diurusutamakan dalam forum internasional, khususnya PBB dan Melanesian Spearhead Group (MSG), dengan tujuan memberikan hak bagi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Dukungan Vanuatu terhadap Papua didasarkan pada kesamaan ras Melanesia, serta aspirasi untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Pasifik Selatan. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya, Vanuatu tetap aktif dalam diplomasi multilateral dan berhasil menarik perhatian internasional terhadap isu HAM di Papua. Kebijakan luar negeri Vanuatu mencakup berbagai strategi untuk menjaga keamanan nasional, memanfaatkan peluang ekonomi, serta menyebarkan nilai-nilai anti-

kolonialisme dan solidaritas Melanesia. Dukungan ini juga dipengaruhi oleh politik domestik Vanuatu, yang menempatkan pentingnya identitas dan persatuan ras Melanesia. Sementara itu, Vanuatu menghadapi tantangan dalam diplomasi internasional karena keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya, namun tetap berhasil mengambil peran signifikan dalam berbagai forum internasional terkait isu Papua (Zahidi, M. S, 2020).

3. KESIMPULAN

Dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua didorong oleh berbagai kepentingan strategis, termasuk keamanan, ekonomi, dan ideologi. Vanuatu memandang dukungan ini sebagai cara untuk memperkuat solidaritas regional, meningkatkan stabilitas, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas Melanesia menjadi faktor utama yang mendorong Vanuatu untuk mendukung Papua agar memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, Vanuatu melihat potensi keuntungan ekonomi dari kemerdekaan Papua, seperti peluang investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, dukungan Vanuatu tidak hanya didasari oleh ideologi, tetapi juga merupakan strategi cerdas untuk memperkuat posisi politik, ekonomi, dan keamanan di Pasifik Selatan.

REFERENSI

- Ahmad, S. *Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua*.
- Holsti, K. J. (1987). *International politics: A framework for analysis*. New Jersey: International, Inc.
- Laia, K. (2022). *Catatan pelanggaran HAM di Tanah Papua pada 2021*. Betahita.
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding foreign policy decision making*. Cambridge University Press.
- Papuans Behind Bars. (2016). *Rising voices, rising arrests*.
- Setiawan, A., & Sulastri, E. (2017). *Pengantar studi ilmu politik luar negeri*. Jakarta, Indonesia: UMJ Pers.

- TAPOL, & BUK. (2022). *Joint stakeholders' submission for the Universal Periodic Review (Fourth Cycle) of the Republic of Indonesia: The 41st session UPR Working*
- VOA Indonesia. (2017). *Survei LIPI: Pelanggaran HAM persoalan terbesar di Papua.*
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign policy in a transformed world*. London, England: Routledge.
- Yandwardhana, E. (2021). Kronologi Vanuatu serang RI di PBB dan sebut-sebut Papua. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-papua>
- Zahidi, M. S. (2020). Analisis kebijakan luar negeri Vanuatu dalam mendukung ULMWP untuk memisahkan diri dari Indonesia. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 65-78.